



BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

FEBRUARI 2015

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. **Edisi khusus ini melaporkan secara mendetil mengenai beberapa perubahan kebijakan drastis yang terjadi di Indonesia sejak November 2014.** Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org dan Christopher Beaton di cbeaton@iisd.org.

Sorotan

- Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan dihapuskannya subsidi bahan bakar bensin (premium) dan memperkenalkan subsidi tetap untuk diesel kendaraan (solar). Keputusan penurunan harga premium dan solar pada 1 Januari ini dilatarbelakangi oleh rendahnya harga minyak dunia, yang kemudian diulang kembali pada 19 Januari 2015. Jumlah terakhir yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2015 menunjukkan penyusutan subsidi BBM sebesar Rp 194,2 triliun (US\$ 15.5 miliar).
- Pemerintah juga mengumumkan mekanisme penetapan harga baru untuk bahan bakar minyak (BBM). Bensin premium akan dijual pada harga pasar, namun biaya distribusinya ke wilayah terpencil akan terus disubsidi. Harga bahan bakar solar akan dijual sebesar Rp 1.000 per liter di bawah harga pasar. Pemerintah akan mengumumkan perubahan harga setiap dua hingga empat minggu sekali.
- Saat ini telah diketahui bagaimana pemerintah akan mengusulkan realokasi anggaran yang dihemat dari belanja subsidi. Laporan terakhir mengindikasikan adanya rencana untuk menyuntikkan pada kisaran Rp 67,86 triliun (US\$ 5,4 miliar) ke sejumlah BUMN untuk pengeluaran infrastruktur.
- Perubahan kebijakan ini dengan erat mengikuti kenaikan harga bensin dan solar pada November 2014. Sejumlah sistem baru untuk memberikan kompensasi diperkenalkan sebelum kenaikan harga ini, termasuk sistem kartu kesehatan dan bantuan langsung tunai baru yang menyalurkan dana bantuan langsung ke rekening penerima.
- Sejumlah reformasi harga juga telah dilakukan untuk LPG tabung 12kg dan tarif listrik.

Indonesia Menghentikan Subsidi Bensin untuk Jawa-Madura-Bali, Transisi ke Sistem Pembayaran Semi Otomatis – Sambil Menurunkan Harga Bahan Bakar

Pada 31 Desember 2014, sejumlah perwakilan kabinet—yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—mengumumkan bahwa harga bahan bakar Indonesia akan diturunkan mulai 1 Januari 2015. Harga premium (bensin RON 88) turun dari Rp 8.500 menjadi

Rp 7.600 per liter (US\$ 0,68 ke US\$ 0,61 per liter)¹, harga solar dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 per liter (US\$ 0,6 menjadi US\$ 0,58 per liter), dan harga minyak tanah tetap sebesar Rp 2.500 per liter (US\$ 0,20 per liter) (Kompas, 2014a).

Saat dilangsungkannya pengumuman tersebut, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa harga premium baru mulai 1 Januari hingga seterusnya akan bebas subsidi. Penyesuaian harga BBM ini ditetapkan berdasarkan asumsi harga

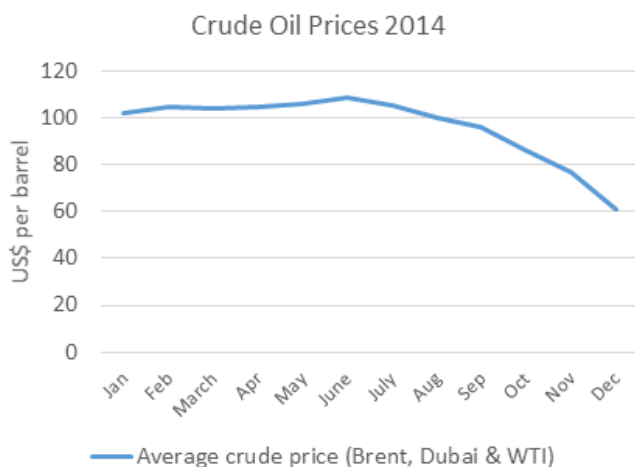
1. Kecuali dinyatakan lain, nilai tukar yang digunakan dalam briefing ini adalah US\$ 0,00008 per Rupiah.

minyak mentah dari US\$ 60 per barel dan US\$ 12.380 per Rp 1 nilai tukar (AntaraNews, 2014).

Dua minggu kemudian – Jumat, 16 Januari – pemerintah mengumumkan bahwa harga bahan bakar kendaraan sekali lagi turun mulai Senin 19 Januari. Harga premium turun dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter (US\$ 0,61 menjadi US\$ 0,53 per liter) dan harga solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6400 per liter (US\$ 0,6 menjadi US\$ 0,51 per liter) (Liputan6, 2015a).

Indonesia telah berhasil melakukan penghapusan subsidi bensin pada saat yang sama dengan penurunan harga bahan bakar ini karena adanya penurunan tajam harga minyak internasional sejak Juli 2014 (lihat Gambar 1), yang pada akhirnya menurunkan harga minyak internasional di bawah tingkat harga yang diregulasi di tingkat domestik.

Gambar 1. Harga Minyak Mentah 2014



Sumber: World Bank, 2015.

Upaya untuk menghapus subsidi juga terjadi pada 2014, namun berdampak sebaliknya, ketika pada 17 November diumumkan bahwa harga domestik akan dinaikkan untuk memotong pengeluaran subsidi. Pada saat itu, harga minyak internasional masih lebih tinggi dari harga domestik. Pemerintah meningkatkan harga premium dari Rp 6.500 ke Rp 8.500 per liter (US\$ 0,52 menjadi US\$ 0,7 per liter) dan Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter (US\$ 0,44 menjadi US\$ 0,62 per liter). Harga baru tersebut segera berlaku pada 18 November 2014, pada pukul 00:00 WIB, sekaligus mengakhiri spekulasi yang berlangsung berbulan-bulan tentang kemungkinan perubahan harga bahan bakar setelah Pemilu Presiden.

Tabel 1. Perubahan Harga Bahan Bakar di Indonesia, 2014-2015 (Rp per liter)

	Pra-reformasi	18 Nov 2014	1 Jan 2015	19 Jan 2015
Bensin Premium	6.500	8.500	7.600	6.600
Solar	5.500	7.500	7.250	6.400
Minyak Tanah	2.500	2.500	2.500	2.500

Pada bulan November, Presiden Joko Widodo, atau yang akrab dipanggil Jokowi, menjelaskan bahwa keputusan untuk mereformasi subsidi merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, khususnya untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (lihat Kotak 1).

Saat ini masih sulit untuk memprediksi bagaimana dampak dari perubahan tersebut. Di satu sisi, gerakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi berkomitmen serius untuk mereformasi subsidi, yang merupakan salah satu sasaran yang ia tekankan pada Pemilu Presiden lalu dan pada saat pelantikan. Frekuensi perubahan harga baru-baru ini amat mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, yang hingga November 2014, hanya mengalami perubahan harga bensin dan solar empat kali sejak 2005. Di sisi lain, masih harus diperhatikan bagaimana tanggapan pemerintah jika harga dunia meningkat kembali. Keputusan untuk kembali menurunkan harga ke level sebelum November adalah kebijakan yang populer, namun hal itu juga berarti akan diperlukan kenaikan harga dalam skala yang lebih besar di masa depan. Melihat situasi politik yang terjadi saat ini, nampaknya akan tetap sulit bagi pemerintah untuk mendorong kenaikan harga yang tidak populer, khususnya bagi kalangan warga yang tidak terbiasa dengan perubahan harga. Segera setelah harga minyak dunia menguat, pemerintah dapat terjebak di antara kebijakan menaikkan harga domestik yang tidak populer, atau mengganggu anggaran dengan membangkitkan kembali subsidi energi secara signifikan.

Skema Subsidi Baru

Pengumuman pemerintah pada 31 Desember lalu tidak hanya terkait perubahan harga, namun juga memperkenalkan skema subsidi BBM baru. Skema tersebut memperkenalkan tiga klasifikasi produk bahan bakar, yaitu BBM tertentu, BBM khusus penugasan, dan BBM umum.

4Kategori pertama, “BBM tertentu”, mencakup solar dan minyak tanah, yaitu produk-produk yang masih

Kotak 1. Pidato Resmi Presiden Joko Widodo tentang Perubahan Harga Bahan Bakar

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat malam salam sejahtera bagi kita semua.

Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan mengambil keputusan. Hari ini setelah melalui serangkaian pembahasan di sidang kabinet paripurna, di kementerian teknis, di Kemenko Perekonomian dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif.

Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perhitungan sosial berupa paket, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia pintar, yang dapat dapat untuk



menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju.

Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang saya sampaikan..

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.”

Sumber: Sekretariat Kabinet RI YouTube Channel, 2015)

menerima subsidi. Subsidi solar baru akan dilakukan dengan mekanisme subsidi tetap, sementara minyak tanah akan dijalankan dengan mekanisme harga tetap. Ini berarti harga solar akan bervariasi pada 2015, dengan margin subsidi keseluruhan tetap antara harga domestik dan harga pasar, dengan harga minyak tanah akan

tetap sama, sementara biaya subsidi keseluruhan akan bergantung pada perbedaan aktual antara harga pasar dengan harga domestik tahunan.

Dua kategori lainnya, yaitu “BBM khusus penugasan” dan “BBM umum”, adalah kategori untuk bensin premium. BBM khusus penugasan adalah bensin yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang dianggap terpencil atau sulit dijangkau. Meskipun BBM jenis ini diberi label non-subsidi, namun sebenarnya masih menerima subsidi untuk mengkompensasi biaya distribusi. Yang ingin dicapai pada dasarnya adalah harga dari BBM khusus penugasan di wilayah terpencil harus sama dengan BBM yang dijual di wilayah pusat seperti Jawa. BBM umum adalah istilah untuk bensin yang benar-benar tidak disubsidi. Bahan bakar ini akan didistribusikan pada harga yang telah disesuaikan dengan harga pasar di wilayah Jawa-Madura-Bali, yang merupakan pusat populasi dan kegiatan ekonomi Indonesia.

BPH Migas sebagai regulator migas hilir Indonesia, menyatakan bahwa tugas untuk mendistribusikan minyak tanah, solar dan premium pada 2015 akan

Tabel 2. Skema Subsidi Bahan Bakar Baru Indonesia 2015

	Bensin Premium	Solar	Minyak Tanah
A. Classification			
BBM Tertentu		✓	✓
BBM Khusus Penugasan	✓		
BBM Umum	✓		
B. Subsidy Type			
Harga Tetap			✓
Subsidi Tetap		✓	
Kompensasi Distribusi	✓		

Sumber: MEMR, 2014.

dijalankan oleh dua perusahaan, yaitu PT Pertamina dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk. Kuota untuk PT Pertamina dilaporkan mencakup 850.000 kiloliter minyak tanah, 15.045 juta kiloliter solar dan 29.46 juta kiloliter premium, sementara kuota untuk PT AKR Corporindo dilaporkan sebesar 625.000 kiloliter solar dan 20.000 kiloliter premium (Rambu Energy, 2014). Saat ini masih belum dapat ditentukan seberapa besar pasokan Premium Indonesia yang akan disalurkan dengan harga pasar penuh di Jawa-Madura-Bali dan seberapa besar yang biaya distribusinya akan disubsidi sebagai “BBM khusus penugasan”.

Formula Penetapan Harga Baru

Formula penetapan harga umum untuk ketiga produk ini mencakup harga dasar, pajak, dan subsidi (jika memang ada). Hal ini bervariasi untuk setiap bahan bakar dengan keterangan sebagai berikut:

- Minyak Tanah: Harga eceran seragam di seluruh Indonesia pada Rp 2.500 (US\$ 0.20) per liter, yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- Solar: Harga akan ditetapkan berdasarkan harga patokan ditambah pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor) dan dikurangi subsidi tetap sebesar Rp 1.000 (US\$ 0.08) per liter.
- Bahan Bakar Penugasan Khusus: Harga ditetapkan berdasarkan harga patokan ditambah pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor), dan sudah termasuk subsidi 2 persen untuk mengkompensasi biaya distribusi yang dibayarkan kepada distributor. Harga eceran akan ditetapkan di tingkat perusahaan, dengan margin keuntungan dipatok antara 5-10 persen pada harga pasar dasar yang digunakan pemerintah.

Harga patokan setiap produk bahan bakar akan ditetapkan oleh pemerintah secara periodik. Hal ini rencananya akan dilakukan setiap bulan atau dua-mingguan, dan akan didasarkan pada indeks harga minyak internasional (Indonesia saat ini menggunakan Mean of Platts Singapore (MOPS)) dan harga beli USD Bank Indonesia dari hari 25 ke hari 24 pada bulan sebelumnya. Konsep harga patokan dalam formula penetapan harga bahan bakar dimaksudkan untuk mengartikulasikan dan mempertahankan prinsip dasar bahwa negara tetap memiliki kendali atas harga bahan bakar domestik (Kementrian ESDM, 2014).

Pajak Pertambahan Nilai Indonesia ditetapkan sebesar 10 persen. Pajak Bahan Bakar Motor ditetapkan sebesar

5 persen untuk Bahan Bakar Penugasan Khusus, sementara pajak untuk bahan bakar non-subsidi akan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tidak lebih dari 10 persen.

Menurut laporan terbaru, para pengecer bahan bakar di Jawa-Madura-Bali diizinkan untuk mengambil margin keuntungan 5 hingga 10 persen, sementara margin keuntungan untuk pengecer di luar Jawa-Madura-Bali ditetapkan seragam sebesar 5 persen (Merdeka, 2015a). Pemerintah juga menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan pengecer untuk menentukan komponen-komponen harga, jika situasi di masa depan kondusif untuk melakukan hal ini (Kementrian ESDM, 2014).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah merasa perlu untuk memperkenalkan pengalaman bersinggungan harga pasar BBM yang fluktuatif (pass-through) kepada masyarakat dan meninjau ulang mekanisme penetapan harga premium dan solar agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan harga minyak di dunia (AntaraNews, 2014).

Dengan skema tersebut di atas, pemerintah berupaya untuk mencetak pengurangan yang signifikan pada biaya subsidi BBM yang dianggarkan pada APBN 2015. Rencana APBN Perubahan (APBN-P) 2015 memperlihatkan bahwa subsidi BBM akan merosot drastis dari Rp 276,4 triliun (US\$ 22 miliar) menjadi Rp 81,8 triliun (US\$ 6,5 miliar) (RAPBN-P 2015; AntaraNews, 2014; Business Recorder, 2014; Asia One, 2015).

Penerapan awal dari skema dan formula baru tersebut di atas setidaknya telah terlihat pada kenaikan harga pada 19 Januari lalu di Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi rata-rata Mean of Platts Singapore (MOPS) Desember, yang merupakan rujukan internasional Indonesia untuk harga BBM Penugasan Khusus (Liputan6, 2015a). Menyusul perubahan tersebut, Direktur Pemasaran PT Pertamina, Ahmad Bambang, menjelaskan bahwa di Jawa dan Madura harga premium adalah sebesar Rp 6.700, sementara harga premium di Bali adalah Rp 7.000. Perbedaan dari harga ini disebabkan oleh perbedaan penerapan pajak bahan bakar motor: di Bali, pemerintah daerah menerapkan tingkat pajak sebesar 10 persen, sementara di Jawa-Madura sebesar 5 persen (Liputan6, 2015b).

Rekomendasi oleh Tim Reformasi Minyak dan Gas

Bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar November 2014, pemerintah membentuk sebuah tim untuk melakukan suatu penilaian menyeluruh tentang tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia. Tim tersebut secara resmi diberi nama Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, namun juga kerap disebut “Tim Anti Mafia Migas”, karena sering diasosiasikan dengan penyelidikan atas dugaan adanya aktivitas yang menyimpang dalam kegiatan perdagangan migas Indonesia. Tim ini dipimpin ekonom, Faisal Basri, dan diberikan waktu 4 bulan untuk menyelesaikan penilaiannya dan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah.²

Selain itu, pada 28 November 2014, pemerintah mengangkan CEO baru PT Pertamina, Dwi Soetjipto. Rini Suwandi, Menteri BUMN, menjelaskan bahwa pengangkatan Soetjipto di pucuk pimpinan PT Pertamina diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan transparansi perusahaan yang dipandang krusial untuk meningkatkan daya saing PT Pertamina di pasar global (Detik, 2014a).

Pada 21 Desember 2014, Tim untuk Reformasi Migas memberikan enam rekomendasi terkait produk bahan bakar kepada Menteri ESDM dan PT Pertamina sebagai berikut (Detik, 2014b):

1. Menghentikan impor RON 88 dan BBG 0,35 persen sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan Mogas 92 dan BBG 0,25 persen sulfur;
2. Meningkatkan kualitas solar yang diproduksi pengilangan domestik agar dapat memenuhi standar BBG 0,25 persen sulfur;
3. Mengkonversi produksi pengilangan bensin RON 88 menjadi RON 92;
4. Memperkenalkan subsidi tetap mesin RON 92, misalnya, sebesar Rp 500 (US\$ 0,04) per liter.

2. Daftar Anggota Tim Reformasi Minyak dan Gas: 1. Faisal Basri (Ketua); 2. Naryanto Wagimin (Wakil Ketua), Dirjen Migas ad interim; 3. Susyanto (Sekretaris), Kepala Legal dan Humas Kementerian ESDM; 4. Darmawan Prasodjo, ahli ekonomi, mantan anggota Rumah Transisi Jokowi; 5. Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada; 6. Rofikoh Rokhim, Kepala Pusat Penelitian manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; 7. Agung Wicaksono, mantan penasihat Kepala UKP4; 8. Daniel Purba, Wakil Presiden Rekrutasi dan Manajemen Proyek PT Pertamina; 9. Parulian Sihotang, Wakil presiden Manajemen Risiko Treasury dan Pajak SKK Migas; 10. Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK; 11. Teten Masduki, aktivis anti-korupsi.

5. Memperhatikan pasokan solar untuk transportasi umum dan transportasi logistik terkait dengan kepentingan umum, sementara kebijakan subsidi terkait solar dapat mempertahankan mekanisme subsidi yang ada;
6. Memahami bahwa konversi produksi pengilangan domestik akan memerlukan:
 - Pembaruan pengilangan domestik sehingga produksi RON 88 dapat diubah menjadi RON 92, dengan masa transisi tertentu;
 - Pemerintah harus memfasilitasi percepatan pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
 - Pengelolaan fasilitas kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) diserahkan kepada PT Pertamina, sehingga peningkatan produksi produksi bensin RON 92 dapat dilakukan secara maksimal;
 - Selama masa transisi, produk RON 88 dipasarkan di wilayah di sekitar pengilangan atau diserahkan kepada kebijakan PT Pertamina;
 - Subsidi untuk RON 88 per liter harus lebih kecil dibandingkan dengan subsidi untuk RON 92;
 - Harga patokan bensin RON 88 merujuk kepada indeks harga pasar dengan formula penetapan harga saat ini.

Rekomendasi-rekomendasi dari Tim Reformasi Migas tidak secara otomatis diadopsi oleh pemerintah, dan rekomendasi tersebut tidak akan menjadi rekomendasi terakhir yang akan disampaikan oleh tim. Fokus utama tim tersebut adalah menilai dan menyarankan arsitektur tata kelola minyak dan gas bumi yang baru untuk Indonesia, sehingga fokus utamanya akan diarahkan untuk perancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang baru atau peraturan bidang migas yang terkait. Akan tetapi, dapat diasumsikan bahwa pendapat tim akan mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah dalam topik atau pada momentum tertentu, seperti perancangan APBN dan inisiatif untuk merubah sistem distribusi Premium dan Solar, yang merupakan dua produk bahan bakar yang secara historis terkait erat dengan subsidi. Khusus pada isu produk BBM bersubsidi ini, Basri menjelaskan bahwa cukup rumit untuk memperkirakan biaya produksi aktual premium RON 88 karena adanya proses blending yang diperlukan untuk mencapai tingkat oktan yang diinginkan. Akibatnya, harga RON 88 premium Indonesia tidak dapat langsung dibandingkan dengan harga patokan yang biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga yang mempublikasikan standar harga produk-produk minyak. Hal ini membuka

peluang terjadinya penyimpangan jika penghitungan subsidi didasarkan pada perbedaan antara harga premium yang disubsidi terhadap harga patokan yang tidak memiliki referensi yang baku (Republika, 2014a).

Pesan inti lain dari rekomendasi di atas adalah menganjurkan bahwa kilang domestik Indonesia harus berupaya memproduksi produk bahan bakar berkualitas lebih tinggi, yang setara dengan standar yang dipasarkan oleh pengecer BBM asing di Indonesia, seperti RON 92. Basri menyatakan bahwa proses transformasi kilang Indonesia ini harus selesai dalam lima bulan (Republika, 2014b).

Skema Realokasi Anggaran

Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi di Forum APEC di Beijing pada 10 November 2014 lalu, prinsip utama di balik realokasi subsidi Indonesia adalah untuk mengalihkan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif (Rappler, 2014). Realokasi anggaran tersebut tidak diragukan lagi merupakan langkah besar yang akan menentukan dampak jangka menengah dan panjang reformasi subsidi bahan bakar Indonesia. Akan tetapi, akuntansi fiskal Indonesia tidak memungkinkan anggaran untuk dirubah dan dialihkan secara langsung dari satu pos pengeluaran ke pos pengeluaran lainnya, seperti mengurangi subsidi BBM untuk ditambahkan ke pos anggaran lainnya. Ini berarti konsep “realokasi” akan cukup sulit direkam dalam dokumen anggaran, dan hubungan antara penghematan dengan realokasi anggaran perlu diteliti dengan cara mengamati perubahan-perubahan dalam pos-pos di APBN Perubahan yang diharapkan akan selesai pada pertengahan 2015.

Meskipun demikian, kabinet Jokowi telah memberikan sejumlah indikasi mengenai bagaimana penghematan subsidi bahan bakar tersebut akan digunakan. Dalam berbagai pernyataannya, Jokowi dan menteri-menterinya telah menjelaskan bahwa pengurangan subsidi akan memungkinkan pemerintah meningkatkan kontribusinya kepada BUMN. Laporan terakhir tentang hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berencana untuk “menyuntikkan” dana sebesar Rp 48 triliun (US\$ 3,8 miliar) ke dalam berbagai BUMN. Dana ini akan diarahkan khususnya kepada BUMN di bidang konstruksi dan transportasi. Laporan-laporan awal menunjukkan bahwa BUMN dimaksud mencakup PT Kereta Api Indonesia (BUMN Kereta Api), Pelindo (BUMN Pelabuhan), Angkasa Pura (BUMN Bandara), PT Hutama Karya (BUMN Konstruksi), PT PLN (BUMN Listrik, yang diharapkan dapat menyelesaikan proyek pembangkit

listrik sebesar 12.000 MW dari 35.000 MW dalam lima tahun ke depan), dan PT Garuda Indonesia Tbk. (BUMN Maskapai Penerbangan) (CNN Indonesia, 2015; Berita Satu, 2015; Fastnews, 2015; Bloomberg, 2015). Akan tetapi, data proposal anggaran terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN sejauh ini baru mengonfirmasi BUMN-BUMN di atas dan belum menyebut BUMN lainnya (lihat Tabel 3).

Pada kesempatan yang lain, Menteri Pertanian, Andi Amran melaporkan bahwa anggaran yang akan diterima kementerianya dari potongan subsidi adalah Rp 16,9 triliun (US\$ 1,4 miliar) yang akan digunakan terutama untuk merevitalisasi infrastruktur irigasi 3,3 juta hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia, mendorong produksi benih padi, distribusi pupuk, meningkatkan produksi kakao, tebu, cabai dan bawang, serta memberikan bantuan keuangan untuk mengimpor sapi induk (Liputan6, 2015c; Kontan, 2015). Dalam APBN 2015, Kementerian Pertanian telah diberikan alokasi dana sebesar Rp 15,4 triliun (US\$1,2 miliar).

Namun demikian, data di atas hanyalah indikasi, dan hanya merupakan bagian dari sekitar Rp 200 triliun (US\$ 16,0 miliar) yang diharapkan akan dihasilkan dari penghematan total. Salah satu spekulasi adalah kemungkinan dana tersebut disalurkan ke dalam program bantuan sosial, yang telah diperluas pada reformasi sebelumnya, yang mencerminkan fakta bahwa subsidi secara umum dikatakan ada untuk membantu masyarakat miskin. Spekulasi lain menyebutkan bidang energi dan lingkungan, di mana keputusan belanja pemerintah akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menentukan masa depan Indonesia untuk beberapa dasawarsa mendatang. Masih menjadi pertanyaan pula apakah pemerintah akan memilih opsi untuk mengurangi defisit, yang saat ini dibatasi undang-undang tidak lebih dari 3% PDB per tahun.

Keseluruhan rencana realokasi hanya dapat dilaporkan setelah usulan Revisi APBN dibuka oleh pemerintah, dan bahkan jika demikian pun masih terdapat kemungkinan terjadi perubahan dalam perdebatan dan kesepakatan di DPR. Sejalan ini oposisi di DPR menyatakan bahwa mereka cukup puas dengan usulan realokasi ke pengeluaran infrastruktur dan tidak menentanginya (Jakarta Post, 2015b). Kecuali terjadi kebuntuan dalam proses negosiasi anggaran perubahan – yang kemungkinannya cukup kecil – maka perubahan anggaran negara diharapkan akan disahkan dalam waktu satu bulan ke depan.

Tabel 3. Rencana realokasi penghematan subsidi kepada BUMN (Rp miliar)

Perusahaan	Sektor	Nilai proyek	Suntikan dana yang diusulkan
PT Angkasa Pura II	Jasa bandara	13,000	3,000
PT ASDP	Angkutan laut	7,000	1,000
PT Pelni	Angkutan laut	1,290	500
PT Djakarta Lloyd	Angkutan laut	850	350
PT Utama Karya	Konstruksi	30,837	3,600
Perum Perumnas	Perumahan	20,000	2,000
PT Waskita karya	Konstruksi	47,832	3,500
PT Adhi Karya	Konstruksi	9,689	1,400
PTPN III	Perkebunan	-	3,150
PTPN VII	Perkebunan	1,172	17.5
PTPN IX	Perkebunan	4,050	100
PTPN X	Perkebunan	1,496	97.5
PTPN XI	Perkebunan	1,477	65
PTPN XII	Perkebunan	2,141	70
PT PNM	Jasa Keuangan untuk UKM	1,000	1,000
PT Garam	Garam	300	300
PT RNI	Agro-industri	1,175	280
Perum Bulog	Pangan Strategis	15,000	3,000
PT Pertani	Pertanian	565	470
PT SHS	Agro-industri	400	400
PT Perikanan Indonesia	Perikanan	300	300
PT Dirgantara Indonesia	Kedirgantaraan	400	400
PT DPS	Perkapalan	700	200
PT DKB	Perkapalan	1,450	900
PT IKI	Perkapalan	400	200
PT ANTAM	Tambang & logam	40,800	7,000
PT PINDAD	Alutsista	700	700
PT KAI	Kereta api	3,000	2,750
PT PPA	Pengelolaan aset negara	2,000	2,000
PT Pengembangan Pariwisata	Pariwisata	2,232	250
PT Bank Mandiri	Perbankan	9,166	5,600
PT Pelindo IV	Pelabuhan	2,000	2,000
PT Krakatau Steel	Baja		956
PT Bahana PUI	Keuangan dan investasi		250
Total		221,652	48,006

Sumber: Jakarta Post, 2015a.

Harga LPG

Pada awal 2015 juga terjadi sejumlah perubahan dalam harga LPG. Pada 31 Desember 2014, Ahmad Bambang, Direktur Pemasaran PT Pertamina, mengumumkan bahwa harga acuan LPG tabung 12 kilogram akan dinaikkan sebesar Rp 1.500 per kilogram (US\$ 0,12 per kg), mulai dari 1 Januari 2015 (Bisnis, 2014). Ini menyebabkan harga LPG 12 kg naik dari Rp 7.569 menjadi Rp 9.069 per kg (US\$ 0,61 menjadi US\$ 0,73 per kg) (TribunNews, 2015). Dengan penambahan biaya pengemasan dalam tabung dan transportasi, serta pajak nilai tambah dan margin keuntungan distributor, akumulasinya menghasilkan harga eceran vendor PT Pertamina sebesar Rp 11.225 per kg atau Rp134.700 per tabung 12kg (US\$ 0,90 per kg atau US\$ 10,78 per 12 kg). Harga ini dapat menjadi lebih tinggi seiring biaya angkut dan faktor lain yang menyebabkan pengecer memutuskan untuk menggelembungkan harga. Di area di luar Jakarta terdapat laporan bahwa harga dapat mencapai Rp 12.500 per kg atau Rp 150.000 per 12 kg (US\$ 1 per kg atau US\$ 12 per tabung 12 kg) (Jakarta Post, 2015c; Merdeka, 2015b).

Pada tanggal 19 Januari terjadi penyesuaian harga kembali dalam bentuk penurunan. Biaya LPG tabung 12 kg diturunkan dari Rp 134.700 menjadi Rp 129.000 per tabung (US\$ 10,7 menjadi US\$ 10,3 per tabung) (Jakarta Globe, 2015).

Menurut pemerintah, LPG tabung 12 kg PT Pertamina adalah produk energi “non-subsidi”, dan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 pasal 25, harga LPG non-subsidi ditetapkan di tingkat perusahaan. Namun demikian, pada kenyataannya kewenangan penetapan harga perusahaan tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa LPG tabung 12 kg telah dijual di bawah biaya pasokan selama bertahun-tahun dan upaya PT Pertamina untuk menaikkan harga LPG pada 2013 sempat dibatalkan setelah adanya instruksi dari Presiden Yudhoyono untuk meninjau ulang keputusan tersebut (Sindonews, 2013).

Belajar dari permasalahan dalam hal koordinasi kebijakan tersebut, PT Pertamina mengembangkan skema penyesuaian harga dan mengumumkan kerangka waktu untuk kenaikan harga LPG non-subsidi setiap 6 bulan yang akan berlangsung hingga akhir 2016. Pada Agustus 2014, Ali Mundakir, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, mengumumkan bahwa pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk kenaikan harga LPG pada Januari 2015 (Liputan6, 2014a). Kenaikan sebelumnya, yang menaikkan harga LPG tabung 12 kg dari Rp 6.069 menjadi Rp 7.569 per kilogram (US\$ 0,47 menjadi US\$ 0,61 per kilogram) berlangsung pada September 2014, pada pemerintahan Yudhoyono (Bisnis.com, 2014). PT Pertamina menyatakan bahwa penetapan harga

yang tidak sesuai dan kesulitan dalam memperbaharui harga telah memaksa perusahaan tersebut menjual produk LPG non-subsidi dibawah nilai ekonominya.

Beberapa hari setelah kenaikan harga LPG baru pada 1 Januari, pasokan LPG tabung 3 kg berkurang di beberapa wilayah. Produk LPG 3 kg ini, yang secara resmi dianggap “disubsidi” negara karena dijual dengan harga yang lebih rendah, adalah produk yang sama dengan LPG 12kg, dan hanya berbeda karena produk ini dijual dalam kemasan yang lebih kecil dengan harga Rp 5.000 per kg atau Rp15.000 per tabung 3kg (US\$ 0,40 per kg dan US\$ 1,2 per 3kg), kurang dari setengah harga per kilogram untuk harga eceran LPG tabung 12kg saat ini. Produk ini dapat diakses dengan bebas oleh setiap pembeli tanpa memandang status ekonomi mereka. Setiap peningkatan kesenjangan harga mendorong konsumen untuk berpindah dari LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi (MetroTVNews, 2015; JPNN, 2015).

Tarif Listrik

PT PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) sebagai BUMN listrik mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk sejumlah kelas pada 2015. Indonesia telah menaikkan tarif listrik dengan penyesuaian periodik berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sejak 2013 (lihat Tabel 1 di bawah untuk uraian lengkapnya). Situs online PT PLN juga mulai mempublikasikan pengumuman tarif bulanan, sejak Mei 2014 (PLN, 2014).

Berdasarkan peraturan terbaru yang ditandatangani pada 24 Desember 2014 oleh Sudirman Said, Menteri ESDM yang baru, tarif listrik akan ditetapkan oleh PT PLN, dan penyesuaian tarif akan dilakukan setiap bulannya, berdasarkan evaluasi nilai tukar Rupiah-USD, harga minyak mentah Indonesia (CPI) dan tingkat inflasi. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.

Tabel 4. Penyesuaian Tarif Listrik untuk Kelas Konsumen Tertentu di Indonesia dari Mei 2014 hingga Januari 2015

Kelompok Tarif	Kelas Tarif	Rp per...	May-14	Jul-14	Sept-14	Nov-14	Jan-15*
Perumahan	R1 up to 450 VA	kWh	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00
	R1 900 VA	kWh	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00
	R1 1,300 VA	kWh	979.00	1,090.00	1,214.00	1,352.00	1,496.05
	R1 2,200 VA	kWh	1,004.00	1,109.00	1,224.00	1,352.00	1,496.05
	R2 3,500 VA - 5,500 VA	kWh	1,145.00	1,210.00	1,279.00	1,352.00	1,496.05
	R3 > 6,660 kVA	kWh	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,496.05
Bisnis	B1 up to 450 VA	kWh	535.00	-	-	535.00	535.00
	B1 900 VA	kWh	630.00	-	-	630.00	630.00
	B1 1,300 VA	kWh	966.00	-	-	966.00	966.00
	B1 2,200 VA - 5,500 VA	kWh	1,100.00	-	-	1,100.00	1,100.00
	B2 6,600 VA - 200 kVA	kWh	1,352.00	-	-	1,352.00	1,496.05
	B3 > 200 kVA	kVArh	1,117.00	-	-	1,117.00	1,159.30
Industri	I1 450 VA	kWh	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00
	I1 900 VA	kWh	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	I1 1,300 VA	kWh	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00
	I1 2,200 VA	kWh	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
	I1 3,500 VA - 14 kVA	kWh	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00
	I3 Tbk > 200 kVA	kVArh	938.00	1,018.00	1,105.00	1,200.00	1,159.30
	I4 > 30,000 kVA	kVArh	819.00	928.00	1,051.00	1,191.00	1,011.99
Pemerintah	P1 6,600 VA - 200 kVA	kVArh	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,496.05
	P2 > 200 kVA	kVArh	1,026.00	1,081.00	1,139.00	1,200.00	1,159.30
		kWh	997.00	1,104.00	1,221.00	1,352.00	1,496.05

Catatan: Ada perbedaan antara tarif yang dipublikasikan pada pengumuman oleh PT PLN dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM. Di tabel ini, tarif dari Mei 2014 hingga November 2014 diambil dari Peraturan Menteri ESDM. Untuk Januari 2015, jika terdapat perbedaan dimanapun, yang digunakan adalah angka dari PT PLN, yang kemungkinan besar lebih akurat dalam mencerminkan situasi saat ini. * menunjukkan pengumuman tarif PT PLN. Biru = tidak ada perubahan tarif, hijau = kenaikan tarif, dan merah = penurunan tarif.

Indonesia masih menyubsidi sejumlah kelas tarif, khususnya untuk sambungan tegangan rendah di kelas perumahan (R), bisnis (B) dan industri (I). Berdasarkan jumlah pelanggan, kelas-kelas tersebut merupakan kelompok pengguna listrik terbesar di Indonesia. Pada 2013, sambungan tegangan rendah (hingga 1.000 V) melingkupi 99 persen dari total konsumen PT PLN yang jumlahnya tercatat lebih dari 53,85 juta konsumen (Kementerian ESDM, 2014, hal.52). Konsumsi bahan bakar untuk pembangkit listrik PT PLN di Indonesia didominasi oleh batu bara dengan konsumsi tahunan sebesar 35,51 juta ton pada 2012 (PLN, 2013), jumlah tersebut setara dengan 57,35 persen konsumsi bahan bakar dari pembangkit listrik Indonesia (Pusdatin, 2014, hal. 96).

Dampak perubahan harga BBM

Terdapat sejumlah dampak serupa dan amat berbeda yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar pada November dan penurunan harga pada Januari. Pada hari-hari menyusul kenaikan harga November, nilai tukar rupiah terhadap US dollar sedikit meningkat (Gambar 1), dan respon serupa juga terlihat pada nilai tukar terhadap Poundsterling Inggris, Euro, Yen dan Yuan (Bank Indonesia, 2014). Bursa Efek Jakarta juga bereaksi positif terhadap keputusan pemerintah tersebut (Gambar 2). Satu hari setelah pengumuman harga baru tersebut, indeks komposit di Bursa Efek Indonesia meningkat sebesar 23,61 poin menjadi 5.077,1 (Kompas, 2014b). Reformasi harga tersebut secara umum dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan investor kepada Indonesia.

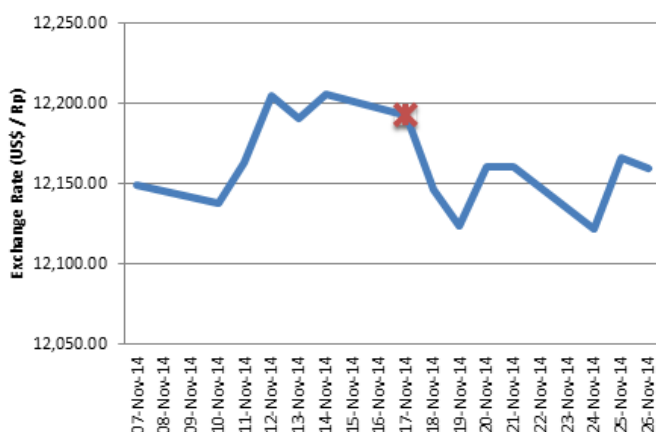
Pada saat yang sama, kenaikan harga BBM di November menyebabkan kenaikan langsung dan tidak langsung pada biaya hidup. Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi tahunan 2014 akan mencapai 7,9 persen –

masih dalam kisaran yang dapat diterima, yaitu antara 7,7 sampai 8,1 persen – dengan kenaikan harga bahan bakar berkontribusi terhadap inflasi tahunan tambahan sebesar 2,6 hingga 3 persen. Dampak inflasi diperkirakan akan berasal dari dampak langsung sebesar 1,3 persen dan dampak tidak langsung dari biaya transportasi sebesar 0,7 persen dan harga pangan sebesar 0,6 persen (Liputan6, 2014b). Rilis terakhir dari BPS memperlihatkan bahwa inflasi tahunan 2014 berada pada level 8,36 persen, 0,26 persen lebih tinggi dari batas atas perkiraan Bank Indonesia. Dalam upaya yang terlihat cukup terencana dalam memoderasi inflasi, pada 18 November, Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen dan meningkatkan nilai tingkat fasilitas pinjaman setengah persen menjadi 8 persen (New York Times, 2014). Langkah antisipasi seperti ini tidak terlihat pada kenaikan harga BBM sebelumnya pada Juli 2013.

Penurunan harga bahan bakar pada bulan Januari juga menyebabkan dampak serupa pada nilai tukar dan pasar saham. Meskipun nilai tukar tetap stagnan, pengurangan harga tersebut dipandang sebagai perubahan positif, dan dipandang sebagai antisipasi terhadap tekanan terhadap rupiah akibat rendahnya permintaan Cina (Jakarta Post, 2015d; Jakarta Post, 2015e). Di pasar saham, indeks harga gabungan meningkat sedikit sebesar 0,07 persen, dan berakhir pada 5.152,09 (Jakarta Post, 2015).

Namun demikian dampak inflasi pada momen penurunan harga BBM bersifat lebih moderat daripada pada saat kenaikan harga BBM. Sejumlah komentator berpendapat bahwa efek “kelekatatan” (stickiness) harga nampaknya telah mencegah penurunan harga BBM untuk mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya.

Gambar 2. Perubahan Nilai Tukar (USD/Rp) Menyusul Pengumuman Kenaikan Harga



Sumber: Bank of Indonesia, 2014.

Gambar 3. Indeks Gabungan Jakarta Menyusul Pengumuman Kenaikan Harga



Sumber: Kontan (2014).

Beberapa pejabat pemerintah telah menghimbau pelaku bisnis dan operator transportasi publik untuk menyesuaikan harga mereka, sementara pada saat yang sama memastikan bahwa pemberlakuan penurunan harga akan memakan waktu. Sejumlah pihak meyakini bahwa diperkenalkannya mekanisme harga baru juga berperan menciptakan situasi tersebut, karena para pemasok yang enggan untuk menurunkan harga berusaha mengantisipasi kemungkinan bahwa mereka akan merugi jika harga energi kembali naik (Establishment Post, 2015). Hingga akhir January, ketegangan ini sepertinya terlihat mulai mereda, dengan mulai menurunnya harga-harga beberapa produk dan jasa seiring dengan turunnya biaya energi.

Respon Publik

Penurunan harga energi dapat dikatakan sebagai kebijakan populer, dan perubahan kebijakan Indonesia pada bulan Januari juga bukan pengecualian, sehingga disambut hangat oleh masyarakat Indonesia. Salah satu kritik terhadap pemerintah terkait dengan efek “kelekatan harga” (price stickiness), di mana penurunan harga energi tampak tidak berlanjut pada penurunan harga lainnya. Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyatakan bahwa hal ini mencerminkan kurangnya persiapan di pihak pemerintah, “Kenapa harga-harga tidak turun? Karena pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengontrol harga karena pemerintah telah menyerahkan segalanya (harga) ke pasar” (Establishment Post, 2015).

Kenaikan harga energi biasanya dipandang sebagai kebijakan tidak populer, sekaligus salah satu kebijakan yang dapat berdampak sangat mengganggu, sebagaimana terjadi pada respon terhadap pengumuman kenaikan harga pada bulan November. Berita kenaikan harga saat itu segera diikuti dengan reaksi masyarakat yang serta-merta berbondong-bondong membeli bensin di SPBU-SPBU di seluruh tanah air, hingga mengakibatkan antrean sepanjang ratusan meter di beberapa tempat. Menghadapi kondisi tersebut, SPBU-SPBU PT Pertamina dijaga ketat oleh polisi bersenjata (Republika, 2014c). Penjualan bahan bakar di sejumlah area di Indonesia melonjak lebih dari dua kali lipat penjualan rata-rata sehari-hari, namun SPBU-SPBU PT Pertamina tetap berhasil beroperasi melalui jam-jam kritis tanpa mengalami kekurangan pasokan (Tempo, 2014a). PT Pertamina sendiri menjelaskan bahwa cadangan BBM untuk sekitar 20-22 hari konsumsi rata-rata tetap terjaga. Fenomena panic buying tersebut segera berakhir setelah harga baru secara resmi diberlakukan.

Pengumuman kenaikan harga bulan November juga ditanggapi dengan protes yang dibumbui kekerasan fisik di sejumlah kota, yang kebanyakan dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Salah satu protes mahasiswa yang paling keras terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Protes di jalan-jalan Makassar telah direncanakan beberapa hari sebelum pengumuman dan memuncak pada 18 November 2014, ketika para mahasiswa memblokir jalan utama di kota tersebut dengan batu dan membakar ban. Di tengah momen itu terjadi peristiwa yang tak diduga-duga, yaitu warga setempat yang kesal dengan pengamanan yang panjang dan transportasi yang terganggu, akhirnya justru menyerang mahasiswa dan mengusir mereka dari jalanan (Tempo, 2014b). Banyak protes yang berakhir dengan bentrok fisik juga dilaporkan di kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Banjarmasin (Sindo, 2014). Protes mahasiswa secara sporadis terus berlangsung pada beberapa minggu setelah pengumuman kenaikan harga.

Menanggapi kenaikan harga BBM, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menghimbau dilakukannya mogok nasional selama satu hari pada 19 November untuk mendorong dilakukannya negosiasi untuk mengelola dampak kenaikan harga BBM di sektor transportasi umum (Kompas, 2014c; Republika, 2014d). Pemogokan di berbagai wilayah di Indonesia ini mengakibatkan beberapa pengguna kendaraan umum, termasuk anak sekolah, terpaksa berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai tujuan mereka. Anggota-anggota Organda menyatakan bahwa keputusan tersebut mengejutkan mereka, karena muncul di tengah-tengah negosiasi dengan pemerintah tentang bagaimana kenaikan harga bahan bakar harus dilaksanakan, yang antara lain mencakup arahan dari pemerintah kepada operator transportasi darat untuk tidak meningkatkan tarif mereka selama tiga bulan pertama setelah diumumkannya harga baru (Radar Tasikmalaya, 2014). Ketua Organda, Eka Sari Lorena Surbakti, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mempertahankan subsidi BBM untuk transportasi umum. Dalam pembicaraan berikutnya dengan Kementerian Perhubungan, Surbakti menyatakan kembali posisi Organda, yaitu pemerintah harus menerapkan diskon separuh harga untuk biaya pemberian lisensi/izin bagi transportasi umum (Republika, 2014e).

Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, segera menanggapi hal ini, dengan mengizinkan para penyedia transportasi publik untuk meningkatkan tarif sebesar 10 persen. Plafon tarif transportasi umum (bus dan

taksi) di Indonesia ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah (The Jakarta Post, 2014). Jonan memahami bahwa kewenangan tarif transportasi umum tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, namun tarif untuk transportasi umum dalam-kota (termasuk tarif taksi) di seluruh provinsi ditetapkan oleh pemerintah daerah, sementara Kementerian Transportasi bertanggung jawab atas tarif transportasi publik dalam-kota antar provinsi. Organda menyatakan bahwa kenaikan tersebut tidak dapat mendukung sektor transportasi umum untuk bertahan dalam goncangan ekonomi aktual sebesar 27-32 persen (Kompas, 2014d).

Di sektor lain, berbagai serikat buruh bergabung dalam protes di jalan-jalan dan serentak meminta pembatalan kenaikan harga bahan bakar dan meminta kenaikan segera upah minimum. Besaran upah minimum untuk 2015 adalah inti dari persetujuan serikat terkait kenaikan harga BBM. Sejak 24 November, 29 dari 33 provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum untuk 2015, dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,77 persen dari plafon upah minimum 2014, yang berarti rata-rata sebesar Rp 1,78 juta (US\$ 142,4) per bulan per pekerja pada 2015. Rata-rata tersebut adalah 99,5 persen dari biaya hidup layak nasional minimum yang sebesar Rp 1,8 juta (US\$ 144) (Liputan6, 2014c).

Namun demikian, reaksi masyarakat tidak sepenuhnya negatif. YLKI mendukung kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut. Akan tetapi, Tulus Abadi, anggota Pengurus YLKI, memperingatkan pemerintah bahwa skema realokasi subsidi harus dibuat sedetil mungkin dan difokuskan untuk mengembangkan sistem transportasi umum yang terjangkau dan nyaman (Pos Kota, 2014). Abadi juga memperingatkan pemerintah bahwa pemerintah harus melakukan suatu terobosan yang signifikan dalam mempromosikan penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar cair di sektor transportasi umum (Merdeka, 2014a). Dari pihak universitas, BEM dari Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan terbuka yang mendukung kenaikan harga BBM. Posisi mereka berbeda dengan posisi sebagian besar organisasi mahasiswa di Indonesia. Para pemimpin mahasiswa dari kedua fakultas tersebut menyatakan bahwa skema subsidi yang salah sasaran telah mengakibatkan semakin besarnya kesenjangan kesejahteraan di Indonesia (Detik, 2014c).

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra memimpin tekanan politik terhadap pemerintah dengan

menyampaikan kritik atas keputusan kenaikan harga BBM. Ia mempermasalahkan keputusan tersebut tidak diperlukan karena harga minyak internasional menurun sepanjang akhir 2014 (Kompas, 2014e). Lebih lanjut, Zon menganggap bahwa penghapusan subsidi BBM disebabkan oleh tekanan IMF (Merdeka, 2014b).

Para pemimpin daerah di Indonesia tampak terbagi dalam opini awal mereka terhadap kenaikan harga BBM bulan November. Indonesia telah menjalankan pemilihan langsung untuk jabatan kepala eksekutif dan anggota legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten sejak 2005, namun rejim pemilu langsung untuk cabang eksekutif daerah berakhir pada 2014 setelah terjadinya persetujuan politik yang mengakibatkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali menerapkan sistem pemilihan berbasis partai untuk pemilihan eksekutif. Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang sebelumnya adalah wakil dari Jokowi ketika masih menjabat sebagai Walikota Surakarta, menyampaikan keberatannya secara tertulis terkait kenaikan harga BBM ini kepada Presiden.

Pada 24 November, seluruh gubernur di seluruh Indonesia, di bawah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), mengadakan rapat tertutup dengan Presiden Jokowi di Bogor. Rapat tersebut menghasilkan resolusi gubernur-gubernur seluruh Indonesia untuk mendukung keputusan pemerintah pusat terkait subsidi BBM. Pesan dukungan ini disampaikan oleh Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Republika, 2014f). Selain itu Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa upaya efisiensi harus diambil pada tingkat regional dengan memotong pengeluaran untuk rapat dan perjalanan dinas. Jokowi memperkirakan bahwa upaya tersebut harus mampu memotong anggaran daerah keseluruhan untuk rapat resmi dan perjalanan dinas dari Rp 40 triliun menjadi Rp 25 triliun (US\$ 3,2 miliar menjadi US\$ 2 miliar) (Deutsche Welle, 2014).

Upaya Mitigasi

Pada momen pengumuman penurunan harga Januari 2015 terkait dengan reformasi subsidi bahan bakar tidak ada mekanisme kompensasi yang diumumkan oleh pemerintah. Hal ini terutama disebabkan karena perubahan di Januari berbentuk penurunan harga, yang akan menguntungkan konsumen di sektor bisnis dan rumah tangga.

Namun demikian perlu diingat juga bahwa kebijakan

kompensasi telah diluncurkan untuk membantu masyarakat yang dianggap rentan terhadap kenaikan harga BBM pada bulan November 2014. Beberapa saat sebelum diumumkannya kenaikan harga bahan bakar, pada 3 November, pemerintah meluncurkan skema bantuan sosial bernama Program Keluarga Produktif, yang mencakup bantuan keuangan, pendidikan, dan dukungan layanan kesehatan, yang dilaksanakan dengan teknologi kartu yang bernama Layanan Keuangan Digital. Dana yang dialokasikan untuk skema bantuan sosial ini berasal dari APBN 2014 namun bukan merupakan realokasi penghematan subsidi BBM. Program ini memperkenalkan sistem bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk empat kartu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), dan kartu SIM ponsel yang digunakan untuk mengecek status rekening mereka tanpa harus pergi ke bank atau kantor pos. Secara keseluruhan, program-program tersebut dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Harian Nasional, 2014).

Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Dana pembayaran pertama bantuan melalui KIP pada 2014 adalah Rp 81,8 miliar (US\$ 6,5 juta) dengan sasaran 152.364 pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas usia 7-18 tahun. KIP direncanakan akan memperluas cakupan bantuan pendidikan – yang sebelumnya dilakukan di bawah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan sasaran penerima 18 juta pelajar dari keluarga miskin – menjadi 24 juta pelajar, dengan memasukkan tambahan pelajar dari keluarga hampir miskin, tunawisma, anak putus sekolah, anak yatim dan anak penyandang disabilitas. Gelombang pertama KIP diluncurkan di 18 kabupaten atau kota (Jakarta, Pandeglang, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, Pematang Siantar, dan Jembrana) (Liputan6, 2014d).

Tabel 5. Pembayaran Pertama Bantuan Pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2014.

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penerima	Nilai Bantuan
Sekolah Dasar	100.776	Rp 450.000/tahun
SMP	36.229	Rp 750.000/tahun
SMU	5.484	Rp 1 juta/tahun
SMK	9.875	Rp 1 juta/tahun

Source: Liputan6, 2014d.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga melakukan perluasan jangkauan asuransi kesehatan yang saat ini mencakup 86,4 juta orang menjadi 88,1 juta sasaran penerima, dengan memasukkan kelompok rumah tangga dari golongan hampir miskin (Republika, 2014g). Program ini diselenggarakan di bawah BPJS Kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk KIS adalah Rp 6,44 triliun (US\$ 0,5 miliar), yang diambil dari APBN 2014, dan gelombang pertamanya ditargetkan untuk 432.000 penerima di 19 wilayah.

Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) merupakan fasilitas bantuan langsung tunai. KSKS dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan didistribusikan melalui kantor-kantor pos di seluruh Indonesia. Berbeda dengan program-program bantuan langsung tunai sebelumnya, KSKS mendistribusikan dana tunai langsung ke rekening penerima dan tidak memberikan uang secara fisik. Besarnya bantuan langsung tunai gelombang pertama adalah Rp 400.000 (US\$ 32) per rekening penerima.

References

- AntaraNews (2014, 31 December). Harga baru BBM premium mulai Januari Rp7.600 per liter. Retrieved from: <http://www.antaraneews.com/berita/471634/harga-baru-bbm-premium-mulai-januari-rp7600-per-liter>
- Asia One (2015, January 2). Indonesia fuel subsidies completely overhauled. Retrieved from: <http://news.asiaone.com/news/asia/indonesia-fuel-subsidies-completely-overhauled>
- Bank of Indonesia (2014). Exchange Rate Transaction. Retrieved from: <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>
- Berita Satu (2015, January 6). Investor Asing Tunggu Implementasi Pengalihan Dana Subsidi BBM. Retrieved from: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/238358-investor-asing-tunggu-implementasi-pengalihan-dana-subsidi-bbm.html>
- Bisnis.com (2014, December 31). HARGA ELPIJI 12 KG: Naik Rp1.500/Kg Mulai Januari 2015. Retrieved from: <http://industri.bisnis.com/read/20141231/44/387031/harga-elpiji-12-kg-naik-rp1.500kg-mulai-januari-2015>
- Bisnis.com (2014, September 10). Harga Gas 12 Kilogram Terus Naik hingga Tiga Kali. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/10/090605847/Harga-Gas-12-Kilogram-Terus-Naik-hingga-Tiga-Kali>
- Bloomberg (2015, January 19). Indonesia Pushes Pertamina Revamp in State Enterprise Reform. Retrieved from: <http://www.bloomberg.com/news/2015-01-19/indonesia-targets-pertamina-revamp-in-state-enterprise-cleanup.html>
- Business Recorder (2014, December 5). Indonesia 2015 fuel subsidy spending may be below 140trn rupiah. Retrieved from: <http://www.brecorder.com/markets/energy/asia/208935-indonesia-2015-fuel-subsidy-spending-may-be-below-140trn-rupiah.html>
- CNN Indonesia (2015, January 2). Jokowi Alirkan Rp 30 Triliun ke Konstruksi dan Transportasi. Retrieved from: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150102145037-78-21994/jokowi-alirkan-rp-30-triliun-ke-konstruksi-dan-transportasi/>
- Detik (2014a, November 28). PR Dirut Dwi Soetjipto: Bikin Pertamina Transparan. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/11/28/173614/2762461/1034/pr-dirut-dwi-soetjipto-bikin-pertamina-transparan>
- Detik (2014b, 21 December 2014). Faisal Basri Cs Keluarkan 6 Poin Rekomendasi Soal BBM Subsidi. Retrieved from: <http://finance.detik.com/read/2014/12/21/150202/2783605/1034/faisal-basri-cs-keluarkan-6-poin-rekomendasi-soal-bbm-subsidi>
- Detik (2014c, November 19). Buat Mahasiswa yang Demo, Coba Disimak Alasan BEM FE UI dan UNPAD Dukung BBM Naik. Retrieved from: <http://news.detik.com/read/2014/11/19/083733/2752333/10/buat-mahasiswa-yang-demo-coba-disimak-alasan-bem-fe-ui-dan-unpad-dukung-bbm-naik>
- Deutsche Welle (2014, November 24). Presiden Jokowi Potong Anggaran Dinas dan Rapat. Retrieved from: <http://www.dw.de/presiden-jokowi-potong-anggaran-dinas-dan-rapat/a-18082882>
- Establishment Post (2015). Why Cheaper Fuel Still Feels Expensive in Indonesia. Retrieved from: <http://www.establishmentpost.com/cheaper-fuel-still-feels-expensive-indonesia/>
- Fastnews (2015, January 2). Ironis, Pemerintah Suntik BUMN dari Dana Pengalihan Subsidi BBM. Retrieved from: <http://m.fastnewsindonesia.com/article/ironis-pemerintah-suntik-bumn-dari-dana-pengalihan-subsidi-bbm#sthash.w4Aw7MNA.dpuf>
- Harian Nasional (2014, November 13). Ini Penjelasan Sistem 'Kartu Sakti' dalam Inpres No 7 Tahun 2014. Retrieved from: <http://harnas.co/2014/11/13/ini-penjelasan-sistem-kartu-sakti-dalam-inpres-no-7-tahun-2014>

Jakarta Globe (2015, January 16). Indonesia to Cut Subsidized Fuel Prices by Average 14% on Monday. Retrieved from: <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-cut-fuel-prices-average-14-monday/>

Jakarta Post (2015a, 20 January). Rp 48t stimulus to help state firms back govt's infrastructure push. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/20/rp-48t-stimulus-help-state-firms-back-govt-s-infrastructure-push.html>

Jakarta Post (2015b, 20 January). Lawmakers support Jokowi's budget. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/20/lawmakers-support-jokowi-s-budget.html>

Jakarta Post (2015c, January 3). Pertamina ups gas canister price. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/03/pertamina-ups-gas-canister-price.html>

Jakarta Post (2015d, January 19). Rupiah Opens Rp 12,603 per dollar on Monday. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/19/rupiah-opens-rp-12603-dollar-monday.html>

Jakarta Post (2015e, January 19). Rupiah Closes Rp 12,590 per dollar on Monday. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/19/rupiah-closes-rp-12590-dollar-monday.html>

Jakarta Post (2015f, January 19). JCI Rises Slightly on Monday's Close. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/19/jci-rises-slightly-monday-s-close.html#sthash.FAmrbb5w.dpuf>

Jakarta Post (2015g, January 10). Jokowi doubles capital expenditure in revised 2015 state budget. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/10/jokowi-doubles-capital-expenditure-revised-2015-state-budget.html#sthash.tdEhhqAS.dpuf>

Jakarta Post (2014, November 20). Association proposes fare increase, incentives. Retrieved from: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/20/association-proposes-fare-increase-incentives.html>

JPNN (2015, January 8). Harga Elpiji 12 Kg Naik, yang 3 Kg Langka. Retrieved from: <http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280041/Harga-Elpiji-12-Kg-Naik,-yang-3-Kg-Langka#>

Kompas (2014a, 31 December). 1 Januari 2015, Harga Premium Turun Jadi Rp 7.600. Retrieved from: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/31/105048526/1.Januari.2015.Harga.Premium.Turun.Jadi.Rp.7.600>

Kompas (2014b, November 18). Harga BBM Naik, Rupiah dan IHSG Menguat. Retrieved from: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/18/093120126/Harga.BBM.Naik.Rupiah.dan.IHSG.Menguat>

Kompas (2014c, November 17). Harga BBM Bersubsidi Naik, Organda Mogok Nasional pada Rabu. Retrieved from: <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/23291741/Harga.BBM.Bersubsidi.Naik.Organda.Mogok.Nasional.pada.Rabu>

Kompas (2014d, November 20). Sambangi Menhub Jonan, Organda Bilang Bukan Organisasi Cengeng. Retrieved from: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/20/194734526/Sambangi.Menhub.Jonan.Organda.Bilang.Bukan.Organisasi.Cengeng>

Kompas (2014e, November 17). Fadli Zon Pertanyakan Kenaikan Harga BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak. Retrieved from: <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/23285691/Fadli.Zon.Pertanyakan.Kenaikan.Harga.BBM.di.Tengah.Turunnya.Harga.Minyak>

Kontan (2015, January 10). Kemtan raih Rp 16,9 T dari realokasi subsidi BBM. Retrieved from: <http://nasional.kontan.co.id/news/kemtan-raih-rp-169-t-dari-realokasi-subsidi-bbm>

Liputan6 (2015a, January 16). Harga BBM Premium Turun Jadi Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per Liter. Retrieved from: <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2161931/harga-bbm-premium-turun-jadi-rp-6600-solar-rp-6400-per-liter>

- Liputan6 (2015b, January 19). Hore! Harga BBM Premium dan Solar Turun Lagi. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2162811/hore-harga-bbm-premium-dan-solar-turun-lagi>
- Liputan6 (2015c, January 6). Dapat Kompensasi Penghapusan Subsidi BBM, Ini Langkah Kementan. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2158539/dapat-kompensasi-penghapusan-subsidi-bbm-ini-langkah-kementan>
- Liputan6 (2014a, August 24). Ini Roadmap Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg Versi Pertamina. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2095481/ini-roadmap-kenaikan-harga-elpiji-12-kg-versi-pertamina>
- Liputan6 (2014b, November 18). BI: BBM Naik, Inflasi 2014 di Level 7,9%. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2135980/bi-bbm-naik-inflasi-2014-di-level-79>
- Liputan6 (2014c, November 24). Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia. Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2138489/daftar-lengkap-ump-2015-di-seluruh-indonesia?p=0>
- Liputan6 (2014d, November 3). Apa Itu Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar? Retrieved from: <http://bisnis.liputan6.com/read/2128190/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-dan-kartu-indonesia-pintar?p=0>
- Merdeka (2015a, January 19). Harga Premium di Jawa dan Madura Rp 6.700, Bali Rp 7.000 per liter. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/uang/harga-premium-di-jawa-dan-madura-rp-6700-bali-rp-7000-per-liter.html>
- Merdeka (2015b, January 3). Kenaikan gas 12 kg, kado pahit di awal tahun. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/uang/kenaikan-gas-12-kg-kado-pahit-di-awal-tahun.html>
- Merdeka (2014c, November 19). YLKI: Transportasi China dan Malaysia gunakan gas dari Indonesia. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/uang/ylki-transportasi-china-dan-malaysia-gunakan-gas-dari-indonesia.html>
- Merdeka (2014b, November 20). Fadli Zon bandingkan harga BBM era Soeharto dan Jokowi. Retrieved from: <http://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-bandingkan-harga-bbm-era-soeharto-dan-jokowi.html>
- MetroTVNews (2015, January 6). Dilema Pertamina Naikkan LPG 12 Kg, Bagaimana Mercy Pakai Solar. Retrieved from: <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/06/341404/dilema-pertamina-naikkan-lpg-12-kg-bagaimana-mercy-pakai-solar>
- Ministry of Energy and Mineral Resources (2014, December 31). Kebijakan Baru Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak. Retrieved from: <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/7048-kebijakan-baru-penetapan-harga-bahan-bakar-minyak.html>
- New York Times (2014, November 18). Indonesia's Central Bank Raises Benchmark Interest Rate as Gas Prices Jump. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2014/11/19/business/international/indonesias-central-bank-raises-benchmark-interest-rate-as-gas-prices-jump.html?_r=0
- PLN (2014). Tarif Tenaga Listrik. Retrieved from: <http://www.pln.co.id/blog/tarif-tenaga-listrik/>
- PLN (2013). Statistik PLN 2012. Jakarta: PLN.
- Pos Kota (2014, November 17). YLKI Dukung Harga BBM Naik. Retrieved from: <http://poskotanews.com/2014/11/17/ylki-dukung-harga-bbm-naik/>
- Pusdatin (2014). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2013.
- Radar Tasikmalaya (2014, November 19). Organda Kecolongan BBM Naik. Retrieved from: <http://www.radartasikmalaya.com/kabupaten/ciamis/2014/organda-kecolongan-bbm-naik.html>

Rambu Energy (2014, December 13). BPH Migas sets subsidized fuel quota for Pertamina and AKR Corporindo. Retrieved from: <http://www.rambuenergy.com/2014/12/bph-migas-sets-subsidized-fuel-quota-for-pertamina-and-akr-corporindo/>

Rappler (2014, November 10). FULL SPEECH: Jokowi at APEC CEO Summit 2014. Retrieved from: <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/74620-full-speech-joko-widodo-apec-summit-beijing>

Republika (2014a, December 27). Sebut Harga Premium tak Jelas, Ini Penjelasan Faisal Basri. Retrieved from: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/27/nh8a38-sebut-harga-premium-tak-jelas-ini-penjelasan-faisal-basri>

Republika (2014b, December 25). Faisal Basri: Peralihan ke RON 92 Bisa Lebih Cepat. Retrieved from: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/25/nh4kr9-faisal-basri-peralihan-ke-ron-92-bisa-lebih-cepat>

Republika (2014c, November 17). Jelang Pemberlakuan Harga Baru BBM, Polisi Jaga SPBU. Retrieved from: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/17/nf6w3r-jelang-pemberlakuan-harga-baru-bbm-polisi-jaga-spbu>

Republika (2014d, November 18). Senior Minister hopes Organda to cancel nationwide strike. Retrieved from: <http://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/14/11/19/nf8v5j-senior-minister-hopes-organda-to-cancel-nationwide-strike>

Republika (2014e, November 21). BBM Naik, Ini Permintaan Organda kepada Menteri Perhubungan. Retrieved from: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/21/nfcnfmm-bbm-naik-ini-permintaan-organda-kepada-menteri-perhubungan>

Republika (2014f, November 24). Bertemu Presiden, Para Gubernur Dukung Kenaikan BBM. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/24/nfjcnq-bertemu-presiden-para-gubernur-dukung-kenaikan-bbm>

Republika (2014g, November 3). Ini Sasaran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Retrieved from: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/03/neg225-ini-sasaran-kartu-indonesia-sehat-dan-kartu-indonesia-pintar>

Sekretariat Kabinet RI YouTube Channel (2015). Presiden Jokowi Tetapkan Harga Baru BBM Bersubsidi. Retrieved from: <https://www.youtube.com/watch?v=WzZQkGxkuPA&feature=youtu.be>

Sindo (2014, November 20). Demo BBM Ricuh di Berbagai Daerah. Retrieved from: <http://www.koran-sindo.com/read/926762/149/demo-bbm-ricuh-di-berbagai-daerah>

Sindonews (2013, March 7). Harga LPG 12 kg batal naik, ini tanggapan Pertamina. Retrieved from: <http://ekbis.sindonews.com/read/724965/34/harga-lpg-12-kg-batal-naik-ini-tanggapan-pertamina-1362647039>

Tempo (2014a, November 18). Penjualan Premium Naik Dua Kali Lipat. Retrieved from: <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/18/078622793/Penjualan-Premium-Naik-Dua-Kali-Lipat>

Tempo (2014b, November 18). Demo BBM, Mahasiswa Bentrok dengan Warga Makassar. Retrieved from: <http://regional.kompas.com/read/2014/11/18/16243161/Demo.BBM.Mahasiswa.Bentrok.dengan.Warga.Makassar>

TribunNews (2015, January 5). Omzet Limas Raga Inti Turun Setelah Harga LPG 12 Kg Naik. Retrieved from: <http://jabar.tribunnews.com/2015/01/05/omzet-limas-raga-inti-turun-setelah-harga-lpg-12-kg-naik>

World Bank (2015). World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). Retrieved from: <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html>

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development
 Head Office
 161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
 Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org

About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development
 Global Subsidies Initiative
 International Environment House 2
 9 chemin de Balaxert, 1219 Châtelaine,
 Geneva, Switzerland

cbeaton@iisd.org
lucky.lontoh@iisd.org

Tel: +41 22 917-8373
 Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>